

A. Alasan Dan Tujuan Penulisan

Pada tahun 2003, menjadi tahun keberhasilan Amerika untuk menguasai Baghdad dan menggulingkan kepemimpinan tirani Saddam Husein. Dan pada saat bersamaan Peshmerga (milisi) Kurdi Irak yang menjadi sekutu Amerika telah memasuki kota kaya minyak Kirkuk dengan mudah tanpa ada perlawanan yang berarti dari tentara keamanan Irak. Peristiwa ini membuat cemas Pemerintah Turki, Turki tidak ingin etnis Kurdi mendirikan negara sendiri dan menguasai ladang-ladang minyak di Kirkuk dan Mosul. Negara Kurdi dengan penghasilan minyak sebagai sumber pemasukan adalah sebuah ancaman besar bagi Turki, karena hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Kurdi di Turki untuk bergabung dengan saudara-saudaranya untuk mendirikan negara Kurdi independen.¹

Di dalam negeri Turki perjuangan separatist Kurdi tidak benar-benar dapat ditumpas, tetapi pada tahun 1999 Abdullah Ocalan pemimpin gerakan perlawanan Kurdi PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) berhasil ditangkap pasukan keamanan Turki setelah tidak berhasil mendapat suaka dari negara-negara Uni Eropa.² Setelah beberapa bulan penangkapan Ocalan, PKK (Kurdistan Workers Party) mengumumkan gencatan senjata, tetapi pada bulan Juni 2004 Kongra Gel, sayap politik PKK mengakhiri gencatan senjata. Bentrokan-bentrokan antara pasukan keamanan Turki dengan gerilyawan PKK kembali terjadi tidak hanya di Turki

¹ *Gerak Maju Kurdi*, (diakses 2 November, 2006); online dalam www.ranesi.nl/arsipaktua/timurtengah/irak/gerak_maju_kurdi.html

Tenggara yang menjadi basis perlawanan PKK tetapi meluas ke kota-kota besar bagian barat Turki.³

Gerakan Separatisme Kurdi di Turki telah menjadi duri dalam daging bagi proses integrasi negara Turki. Tuntutan-tuntutan keadilan, kesamaan hak, kebebasan, otonomi khusus atau bahkan independensi total telah lama mereka perjuangkan baik dengan cara kekerasan atau non-kekerasan. Perjuangan bangsa Kurdi untuk mendapatkan tanah airnya sendiri telah menjadi cerita konflik etnis terlama di Timur-tengah disamping Palestina. Berbeda dengan perjuangan rakyat Palestina yang secara moral mendapat dukungan dari banyak negara terutama negara Islam, maka perjuangan Kurdi minus dukungan karena problema Kurdi sama sekali minus dari solidaritas agama, mengingat yang dihadapi adalah kelompok seagama. Tetapi secara substansi masalahnya tak kalah penting dengan perjuangan minoritas lainnya seperti Chechnya, Khasmir, Moro, dan sebagainya. Untuk itulah penulis merasa terasa tertarik untuk mengangkat permasalahan Kurdi di Turki ini sebagai tugas akhir dengan menghadirkan sebanyak mungkin data empiris dan fakta mengenai sebab-sebab gerakan separatis Kurdi yang lebih mengutamakan penggunaan kekerasan dalam mewujudkan sebuah negara merdeka. Semoga penelitian yang sangat sederhana ini, dapat menggugah keinginan penelaah-penelaah lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

³ K. ... 11 Desember 2000 ...

yang lebih tinggi mantan presiden Turgut Ozal yang juga pernah menjabat sebagai perdana menteri juga seorang keturunan Kurdi Turki.⁵ Pada tahun yang sama, penerbitan buku majalah, koran berbahasa Kurdi mulai tersebar luas. Ini mengindikasikan bahwa ada usaha-usaha etnis Kurdi Turki untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam Negara Turki.

Meskipun banyak organisasi-organisasi politik yang dalam aktivitas pergerakannya ditujukan untuk menyuarakan aspirasi etnis Kurdi Turki, namun PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) dianggap satu-satunya partai yang secara sadar ditujukan kepada kaum miskin, warga desa yang tidak berpendidikan dan para pemuda di kota yang merasa telah lepas dari masyarakat mereka. Dan kelompok ini merupakan mayoritas etnis Kurdi Turki, PKK berhasil menarik simpati mereka melalui program sederhana dan penekanan yang kuat pada aksi bersenjata. Dengan singkat kata, tanpa ada PKK dengan aktifitas-aktifitasnya yang sensasional, bisa dipastikan masalah Kurdi di Turki ini bukan masalah yang problematis bagi Pemerintah Turki. Terbukti diantara lusinan organisasi yang membela hak-hak etnis Kurdi Turki hanya PKK satu-satunya yang mampu berhadapan face to face dengan pemerintah. Hingga, lebih dari dua dekade PKK tetap mampu melakukan aksinya meski pemerintah Turki telah menggunakan kekuatan penuh militer yang dimilikinya untuk mengakhiri aktivitas PKK.

Pada awalnya PKK ini merupakan organisasi yang bernama *Ankara Democratic Patriotic Association of Higher Education*, yang didirikan oleh Abdullah

⁵ Kementerian luar negeri Turki, *separatist terror: manace of the post cold war period, case study*

B. Latar Belakang Masalah

Bangsa Kurdi adalah minoritas etnis terbesar di Timur-tengah, populasi mereka sekitar 25-30 juta jiwa. Wilayah yang mereka diami tercantum dalam peta selama berabad-abad sebagai "Kurdistan" yang saat ini masuk kedalam Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Setengah dari populasi Kurdi seluruhnya berada di Turki, jumlah mereka meliputi 20 persen dari populasi penduduk Turki secara keseluruhan.⁴ Tidak seperti etnis Greek (orang Yunani), Etnis Armenia dan Yahudi, orang-orang Kurdi mempunyai persamaan dengan etnis Turki (mayoritas masyarakat Turki) yaitu penganut Islam Sunni. Beberapa dekade lalu etnis Kurdi banyak tinggal di tenggara Turki, namun saat ini warganegara Turki dari etnis Kurdi telah hidup menyebar di seluruh negeri Turki.

Hingga diakhir tahun 1980-an dan tahun 1990-an, banyak organisasi yang menyuarakan aspirasi Kurdi. Banyak dari organisasi tersebut mengambil gerakan kiri dalam aktivitas gerakannya. Beberapa dari organisasi itu adalah partai politik seperti; Halkin Emek Partisi (Partai Buruh Turki), Demokrasi Partisi (DeP), dan HaDeP (Partai Demokrasi Rakyat). Walaupun banyak dari partai ini akhirnya dilarang pemerintah Turki, namun tidak dapat menghentikan keinginan para pemimpin Kurdi Turki untuk dapat menyelesaikan permasalahan Kurdi Turki dengan cara-cara politik damai. Pada puncaknya, setelah pemilihan umum Turki pada Oktober 1991, lebih dari 20 perwakilan Kurdi dari Partai DEP (Demokrasi Partisi) berhasil mendapat mendapat kursi di parlemen nasional Turki, termasuk Leyla Zana yang menjadi wanita Kurdi pertama yang berhasil duduk di parlemen nasional Turki. Pada tingkat

Ocalan pada awal tahun 1970-an. Namun pada tahun 1978 organisasi ini berubah nama menjadi Kurdistan Workers Party (*partiya Karkeren Kurdistan:PKK*), dan menjadi organisasi separatis yang melancarkan perjuangan kemerdekaan di Turki dan berbasis di Turki Tenggara yang dianggap sebagai tanah air bangsa Kurdi, mereka menyatakan pemerintah sendiri, dan melancarkan kampanye bersenjata melawan pemerintah Turki.

Sejak berdirinya pada tahun 1978 hingga 1999, PKK dan Pasukan Keamanan Turki telah melakukan perang terbuka. Kekejaman PKK dan operasi militer yang dilakukan pasukan keamanan di sisi lain memaksa warga sipil Kurdi di daerah tenggara Anatolia meninggalkan desa-desa dan bermigrasi ke kota-kota Turki Barat atau bahkan ke negara-negara Eropa Barat. Perang terbuka antara pasukan keamanan Turki dan gerakan gerilyawan PKK telah memaksa penduduk desa untuk mengungsi dan takut untuk kembali ke desanya.⁶ Diperkirakan 3.000 desa Kurdi di tenggara Turki benar-benar dihapus dari peta, dan lebih dari 35.000 jiwa telah menjadi korban sejak PKK melancarkan kampanye gerilyanya.

Aktifitas-aktifitas gerilyawan PKK selain banyak melancarkan serangan atas pasukan keamanan Turki, juga menyerang sipil-sipil Turki yang berada di luar negeri atau juga berada di dalam negeri Turki, sama halnya dengan sipil Kurdi yang dianggap tidak bekerjasama dengan PKK. Para pengamat Turki mengatakan aksi-aksi teroris seperti bom-bom bunuh diri dengan target instalasi-instalasi pemerintah dan polisi menjadi salah satu jenis serangan yang dilancarkan aktivis-aktivis PKK. Mereka juga menyerang perkampungan dan kota-kota kecil. Pada tahun 1993, PKK

⁶ *Turkey's war on his Kurds* (diakses 22 Desember, 2006); online dalam www.thebulletin.org/article.php?art_ofn=ma99mckieman

melancarkan serangan terkoordinasi meliputi peledakan-peledakan bom dan perusakan-perusakan atas kantor-kantor dagang dan diplomat Turki di 6 (enam) kota di Negara-negara Eropa Barat. Operasi PKK juga menggunakan bom dan granat di tempat-tempat wisata di Istanbul dan tempat-tempat wisata pantai Turki. Mereka juga menculik wisatawan barat untuk menarik publisitas yang lebih luas. Selama berjuang di tenggara Turki, gerilyawan PKK juga membunuh penduduk sipil dan benteng desa Kurdi yang loyal kepada pemerintah Turki.⁷

Pemerintah Turki memandang PKK sebagai organisasi teroris separatis yang berjuang menghancurkan integritas teritorialnya dengan berusaha mendirikan negara merdeka di tenggara Anatolia, sedangkan mayoritas masyarakat Kurdi Turki memandang bahwa PKK hanya organisasi yang membela hak-hak Kurdi di Turki. Hasilnya, sebanyak apapun kekerasan dan teror yang digunakan PKK, organisasi ini tetap mendapat dukungan baik secara terang-terangan atau diam-diam dari masyarakat Kurdi.

C. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah: “Mengapa Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) menggunakan cara-cara kekerasan dan teror dalam usaha memisahkan diri dari Turki?”

⁷ *Kurdistan Workers Party: Turkey, Separatists*, (diakses 23 Maret, 2007); online dalam http://www.english.com.tr/press/KURDISTAN_WORKER_PARTY.htm

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam pergerakan separatis PKK ini, akan digunakan Teori Relative Deprivation (RD) sebagai kerangka pemikiran. Teori ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pergerakan separatis Kurdi di Turki dalam kurang lebih 2 dasawarsa.

- **Teori Relative Deprivation**

Setiap keputusan yang dibuat pemerintah bisa membantu maupun memberatkan rakyat. Kepentingan rakyat bisa dipenuhi tetapi bisa juga dikecewakan oleh pemerintah. Kekerasan merupakan wujud dari ketidakpuasan individu terhadap lingkungan sekitar, hal ini terdapat dalam *Teori Relative Deprivation* dalam bukunya Ted Robert Gurr (*why man rebel*), mengenai kondisi yang mendorong seseorang terlibat dalam kekerasan politik. Teori ini menyatakan diskrepansi yang berlangsung antara harapan tentang nilai (*value expectation*) dan kapabilitas untuk memperoleh nilai. Kesenjangan terjadi jika yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kekecewaan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kekerasan.⁸

Dalam buku Gurr yang lain yang berjudul *Ethnic Conflict in World Politics*, menyebutkan setidaknya ada empat kondisi yang cenderung membentuk rasa penderitaan dari suatu kelompok dan potensi tindakan mereka atas dasar itu. Sebagian besar dari kondisi-kondisi itu adalah endapan dari proses sosial dan politik dalam jangka waktu yang lama. Kondisi-kondisi itu adalah tingkat kerugian atas ketidakadilan kolektif (*extent of collective disadvantage*), menonjolnya identitas

kelompok (the salience of group identity), tingkat kohesi dan mobilitas kelompok (the extent of group cohesion and mobilization), dan kontrol represif oleh kelompok dominan (*repressive control by dominant group*).⁹

a) Tingkat Ketidakadilan Kolektif (*Extent of Collective Disadvantages*)

Tingkat ketidakadilan kolektif merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Meliputi ketidakadilan dalam distribusi materi dan akses politik atau deprivasi nilai kesejahteraan dan nilai kekuasaan kelompok-kelompok yang berkuasa menciptakan pola-pola otoritas dan berbagai macam hambatan sosial untuk melindungi kepentingan mereka. Termasuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek diskriminatif, sehingga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari pihak-pihak minoritas.

Diskriminasi adalah tingkat ketidakadilan sosial terhadap akses material dan politik dari suatu anggota kelompok dibanding dengan kelompok sosial lainnya. Ketidakadilan (inequalities) antara kelompok-kelompok etnik dapat berasal dari diskriminasi historis atau dari perbedaan ekonomi dan budaya yang memberikan keuntungan kepada suatu kelompok lainnya.

Indikator dari diskriminasi ekonomi adalah:

- o Kebijakan-kebijakan publik yang membatasi aktivitas-aktivitas atau peranan-peranan anggota suatu kelompok.
- o Pendapatan rendah, perumahan yang buruk, dan tingginya tingkat kematian dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat.

⁹ Dodi Wibowo, "Konflik Etnis Minoritas Russia di Estonia" (S.I.P Universitas Gajah Mada, 2001) dikutip dalam Ted Robert Gurr dan Barbara Harff, *Ethnic Conflict in Modern World* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), hal. 10.

- Akses dari suatu kelompok yang terbatas dalam pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
- Secara proporsional, hanya sedikit anggota kelompok yang berada pada posisi komersial, manajerial, atau professional.

Sedangkan indikator dan diskriminasi politik adalah:

- Kebijakan-kebijakan publik yang membatasi partisipasi kelompok dalam politik dan akses jabatan politik.
- Partisipasi yang rendah dalam politik dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat.
- Secara proporsional, hanya sedikit anggota suatu kelompok yang menduduki posisi elective office, pegawai negeri atau jabatan tinggi dalam polisi dan militer.¹⁰

Collective disadvantages juga mencakup penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap suatu kelompok etnik. Penghancuran sistematis pada suatu etnis adalah bentuk paling keras dari kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan disebut dengan genosida. Bentuk kekerasan lainnya adalah pembunuhan, penyiksaan, eksekusi dan penahanan tanpa proses hukum. Relokasi paksa (deportasi) dan sebagainya.¹¹

b) Menonjolkan Identitas Kelompok (Salience of Group Identity)

Kekuatan identitas kelompok etnik ditentukan oleh sejumlah karakter yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Semakin banyak jumlah karakter

¹⁰ Ted Robert Gurr and Barbara Harff, *Ethnic Conflict in World Politics* (San Fransisco: Westview

tersebut seperti agama, budaya, sejarah yang sama, tempat bermukim dan ras maka semakin kuat identitas suatu kelompok etnis. Dalam penduduk asli yang terancam dan bangsa yang ditaklukkan, salience identitas kelompoknya biasanya kuat. Namun kekuatan identitas kelompok dalam etnoklas dan beberapa sekte agama diperlemah oleh asimilasi dalam sosial yang plural. Identitas kelompok dapat cair oleh adanya stratifikasi dan segmentasi dalam kelompok. Persoalannya terletak apakah rasa identitas bersama cukup kuat untuk mengatasi loyalitas sempit dalam kelompok seperti klan, kelas, dan kekerabatan. Kondisi eksternal memengaruhi dari kekuatan identitas kelompok yaitu:

- o Besarnya disadvantages dari kelompok komunal.¹²
- o Tingkat perbedaan budaya antar kelompok komunal dengan kelompok komunal lain.
- o Intensitas konflik antara kelompok dengan negara.

Disadvantages dan perbedaan budaya bekerja lambat untuk menimbulkan konsekwansi, sementara konflik dengan pihak lain (kelompok lain atau negara) lebih cepat menimbulkan akibat. Ketika suatu periode konflik terjadi hal itu akan meninggalkan endapan yang selalu hidup dalam memori rakyat dan dalam waktu lama, memori itu dapat dibangkitkan oleh pemimpin kelompok untuk membenarkan suatu tindakan politik.

c) Tingkat Kohesi dan Mobilisasi Kelompok (*The Extend of Group Cohesion and Mobilization*)

¹² Kelompok komunal adalah masyarakat psikologis yaitu kelompok yang anggota-anggota intinya memiliki identitas kolektif yang abadi dan unik atas dasar cirri-ciri budaya dan cara hidup yang penting bagi mereka dan dengan orang lain yang berinteraksi dengan mereka

Penentu utama terjadinya konflik etnopolitik adalah kohesi dari kelompok etnis yang bersangkutan dan kekuatan kepemimpinannya. Kelompok-kelompok yang kohesif adalah kelompok yang memiliki jaringan komunikasi dan interaksi yang menghubungkan pemimpin dan pendukungnya. Pemimpin etnopolitik yang kuat membangkitkan kohesi kelompok yang membuat pendukungnya patuh pada kelompoknya. Kelompok yang kohesif dengan pemimpin yang autokratik, kecil kemungkinan menghadapi hambatan-hambatan internal atas keputusan-keputusan untuk menggunakan bentuk-bentuk kekerasan sebagai bentuk tindakan politik, sedangkan kelompok etnik yang terorganisir secara demokratis biasanya kurang kohesif dan memiliki berbagai pandangan yang berlainan dalam melakukan tindakan politik. Pemimpin kelompok yang autokratis lebih memungkinkan untuk memobilisasi orang daripada pemimpin yang demokratis.

Kohesif kelompok meningkat bila kelompok tersebut terkonsentrasi secara regional, memiliki traits dan penderitaan yang sama dalam jangka waktu yang lama, dan secara luas menerima pemimpin yang autokratik. Dengan demikian, ketika pemimpin memutuskan untuk menggunakan bentuk-bentuk kekerasan sebagai tindakan politik untuk memprotes grievances mereka, mereka kemungkinan besar akan melakukannya dalam kelompok yang kohesif dan memiliki sejarah grievances yang lama dan menerima pemimpin autokratik yang kuat. Kelompok-kelompok yang struktur otoritas tradisionalnya masih utuh relatif lebih kohesif, demikian juga halnya dengan kelompok-kelompok yang berada dalam keadaan...

Mobilisasi berarti kesiapan anggota kelompok untuk menyalurkan energi dan sumber daya mereka untuk tindakan-tindakan kolektif atas nama kepentingan bersama. Kelompok etnis dapat dimobilisasi jika hadirnya dua kondisi yaitu kelompok yang kuat dikombinasikan dengan ketidakadilan yang mereka rasakan.

d) Kontrol Refresif oleh Kelompok Dominan (*Refresif Control by Dominan Group*)

Pemberlakuan kebijakan yang berat sebelah memicu kecemburuan sosial dan kesenjangan. Kelompok-kelompok etnis yang status subordinasinya dipertahankan dengan paksaan biasanya menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap kelompok dominan.

Pengintegrasian Kurdi masuk ke dalam Turki Modern bukan tanpa masalah, banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan Etnis Kurdi pada awal berdirinya Turki Modern. Sebenarnya Etnis Kurdi mempunyai hak untuk mendirikan sebuah negara Kurdistan independen sebagaimana termaktub dalam Traktat Sevres (1920), namun kesempatan ini hilang ketika Traktat Lausanne (1923) diratifikasi secara sepihak oleh Kemal Ataturk dan pihak penjajah. Hal tersebut tentu saja membuat marah sebagian besar para pemimpin Kurdi yang akhirnya timbulnya banyak pemberontakan-pemberontakan untuk memerdekakan wilayah Kurdistan yang berada di wilayah negara Turki modern, namun semua pemberontakan dapat ditumpas oleh pemerintah Turki dengan kebijakan refresif yang menggunakan cara-cara militeristik. Dalam kampanye penumpasan pemberontakan ini target serangan pasukan militer tidak hanya para pemberontak namun rakyat sipil yang tak bersalah, termasuk wanita, bayi dan anak-anak

Collective disadvantages yang paling besar terjadi diakhir tahun 1930-an, ketika lebih dari 5000 etnis Kurdi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak dibunuh pasukan keamanan Turki, dan lebih dari 20.000 lainnya di deportasi ke propinsi-propinsi Turki non Kurdi di barat Anatolia. Dalam pembantaian ini setidaknya 10 persen dari etnis Kurdi Turki terbunuh. Setelah terjadinya pembantaian ini, eksistensi Etnis Kurdi Turki secara resmi ditolak. Penggunaan bahasa, pakaian, dan segala sesuatu yang menyiratkan kebudayaan Kurdi dilarang, bahkan mereka disebut sebagai suku Turki pegunungan, dan istilah ini tetap dipakai hingga Perang Teluk terjadi. Kampanye asimilasi juga lancar dilakukan pemerintah dengan menempatkan orang-orang Turki di wilayah-wilayah basis Kurdi atau sebaliknya. Penindasan-penindasan ini tentu saja menguatkan salience identitas Kurdi Turki yang memang secara etnis berbeda dengan mayoritas orang Turki. Kebijakan diskriminatif ini juga meliputi dunia politik nasional Kurdi, Partai-partai yang mengangkat permasalahan Kurdi akan dilarang dan para pemimpin partai dan simpatisannya banyak yang diculik atau bahkan terbunuh secara misterius.

Keadaan ini tentu saja membuat frustrasi yang berkepanjangan bagi bangsa Kurdi Turki. Sehingga gerakan separatis yang menggunakan cara-cara kekerasan dianggap lebih diutamakan daripada politik cara damai. PKK yang merupakan gerakan separatis yang mengutamakan cara-cara kekerasan mempunyai aktivis dan simpatisan ribuan dari Etnis Kurdi Turki. Ini menandakan rakyat dari etnis Kurdi baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi membenarkan tindakan PKK. Bagi generasi muda Kurdi, kemerdekaan adalah harga mati yang hanya dapat diraih dengan menggunakan cara-cara militeristik demi berdirinya sebuah negara Kurdistan

Bagi pemerintah Turki sendiri kemerdekaan bagi Kurdi Turki adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, selain dapat merusak integritas nasional Turki, hal tersebut juga dapat memancing nasionalisme Kurdi di Suriah, Irak dan Irak. Sehingga pendekatan-pendekatan yang lebih represif dan diskriminatif lebih berperan untuk menyelesaikan masalah gerakan separatis PKK daripada pendekatan yang integratif dan akomodatif. Petinggi-petinggi militer menganggap konsesi apapun pada Etnis Kurdi Turki bahkan di bidang budaya sekalipun hanya menunjukkan kelemahan pemerintah dan mendorong tuntutan konsesi lain, pada akhirnya Turki terjebak dalam lingkaran setan: “teror-represi-teror”.

E. Hipotesa

Dari uraian permasalahan dan kerangka berfikir yang ada, pada kasus pergerakan separatis Kurdi Turki ini, penulis mengajukan hipotesa: “Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) menggunakan cara-cara kekerasan dan teror dalam usaha memisahkan diri dari Turki karena tingginya tingkat collective disadvantage yang diderita Etnis Kurdi Turki yang menguatkan identitas etnis mereka sehingga memudahkan mereka untuk dimobilisasi dalam melakukan serangkaian aksi kekerasan dan teror atas nama etnis untuk membenarkan tindakan mereka yang direspon oleh pemerintah Turki dengan kebijakan represif militeristik yang akhirnya membuat permasalahan separatis Kurdi ini menjadi permasalahan yang

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sebagian besar didapatkan dari data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel di internet, dan lain-lain.

G. Jangkauan Penulisan

Masalah gerakan separatis minoritas adalah masalah yang sangat menarik untuk dipaparkan dan dianalisa. Dari sekian banyaknya masalah separatis yang dilakukan minoritas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut masalah pergerakan minoritas Kurdi yang berada di Turki. Untuk mempertajam tingkat analisa, penelitian hanya menekankan pada sebab-sebab munculnya pergerakan separatis Kurdi yang lebih mengutamakan cara-cara kekerasan dan teror dalam mencapai tujuan mereka tersebut, dimulai dari tahun 1978 pada awal berdirinya PKK (Partiya Karkaren Kurdistan) hingga tahun 1999 ketika pemimpin PKK Abdullah Ocalan tertangkap dan kemudian PKK mengumumkan gencatan senjata. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa diluar batasan tersebut yang dianggap penulis mempunyai relevansi kuat juga akan tetap dipaparkan.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, membahas kerangka awal penelitian yang meliputi alasan dan tujuan penulisan, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bahasan difokuskan pada diskripsi siapa yang disebut Etnis Kurdi, sejarah pengintegrasian wilayah Kurdi ke dalam Turki modern, Etnis Kurdi di Republik Turki Modern.

Bab ketiga, menekankan pada aktifitas-aktifitas PKK sebagai gerakan separatis Kurdi yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam aktifitasnya.

Bab keempat, menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab gerakan separatis Kurdi PKK lebih mengutamakan cara-cara kekerasan dalam aksinya sesuai dengan dasar teoritik yang dipakai.

Bab kelima adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya